



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN MALANGBONG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 100);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MALANGBONG TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 100) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 125

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN MALANGBONG
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Kecamatan Malangbong merupakan dokumen perencanaan Kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, sehingga Perubahan Renja PD juga harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD tahun 2023.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat**”. telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 120 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi menjadi 2 yakni urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya.

Perubahan Renja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 disusun mengacu kepada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Malangbong Tahun 2019-2024, serta memperhatikan kepada RPJMD Kab. Garut 2019-2024.

Renja menterjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Kecamatan sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD dan juga

tujuan serta sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Propinsi, memuat target kinerja yang sudah di tetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM, Perencanaan perubahan di fokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011

- Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan/ SKPD ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Malangbong Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Malangbong sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tidak lanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Malangbong sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Kecamatan Malangbong merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Malangbong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Malangbong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Malangbong selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Renja tahun 2023 di Kecamatan Malangbong Sebanyak 6 Program, 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan capaian Renstra Kecamatan Malangbong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 6 (Enam) Program yang dilaksanakan pada Kecamatan Malangbong dalam pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai Triwulan II, ada 6 (Enam) Program yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dari total anggaran sebesar Rp. 3.085.331.091,- terealisasi Rp. 862.204.825,- atau 27,94 %
2. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Dari total anggaran sebesar Rp. 294.540.170,- terealisasi Rp. 89.441.500,- atau 30,36 %
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Dari total anggaran sebesar Rp. 45.000.200,- terealisasi Rp. 8.420.200,- atau 18,71 %
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Dari total anggaran sebesar Rp. 137.895.400,- terealisasi Rp. 31.080.000,- atau 22,53 %
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
Dari total anggaran sebesar Rp. 140.621.600,- terealisasi Rp. 56.056.525,- atau 39,86 %
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Dari total anggaran sebesar Rp. 62.800.300,- terealisasi Rp. 42.189.200,- atau 67,17 %

Dari 15 (Lima Belas) Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Malangbong dalam pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai Triwulan II, ada 15 (Lima Belas) yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Dari total anggaran sebesar Rp. 10.196.400,- terealisasi Rp. 4.196.400,- atau 41,15 %
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah.
Dari total anggaran sebesar Rp. 2.363.292891,- terealisasi Rp. 715.542.198,- atau 30,27 %

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah.
Dari total anggaran sebesar Rp. 10.654.800,- terealisasi Rp. 6.147.000,- atau 57,69 %
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Dari total anggaran sebesar Rp. 175.839.200,- terealisasi Rp. 73.106.730,- atau 41,57 %
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Dari total anggaran sebesar Rp. 431.852.400,- terealisasi Rp. 28.554.400,- atau 6,61 %
6. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah.
Dari total anggaran sebesar Rp. 52.579.300,- terealisasi Rp. 15.260.000,- atau 20,02 %
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dari total anggaran sebesar Rp. 40.916.100,- terealisasi Rp. 19.398.100,- atau 47,40 %
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Dari total anggaran sebesar Rp. 101.740.020,- terealisasi Rp. 17.461.000,- atau 17,16 %
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Dari total anggaran sebesar Rp. 192.800.150,- terealisasi Rp. 71.980.500,- atau 37,33 %
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Dari total anggaran sebesar Rp. 15.000.200,- terealisasi Rp. 8.420.200,- atau 56,13 %
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Dari total anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi Rp. 0,- atau 0 %
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Dari total anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- terealisasi Rp. 22.500.000,- atau 41,66 %
13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah

Dari total anggaran sebesar Rp. 83.895.400,- terealisasi Rp. 8.580.000,- atau 10,22 %

14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dari total anggaran sebesar Rp. 140.621.600,- terealisasi Rp. 56.056.525,- atau 39,86 %

15. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari total anggaran sebesar Rp. 62.800.300,- terealisasi Rp. 42.189.200,- atau 67,18 %

Dari 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Malangbong dalam pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai Triwulan II, ada 38 (Tiga Puluh Delapan) yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Dari total anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi Rp. 0,- atau 0 %

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Dari total anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi Rp. 0,- atau 0 %

3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Dari total anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi Rp. 0,- atau 0 %

4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Dari total anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi Rp. 0,- atau 0 %

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dari total anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi Rp. 0,- atau 0 %

6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dari total anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi Rp. 0,- atau 0 %

7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dari total anggaran sebesar Rp. 2.356.123.691,- terealisasi Rp. 715.542.198,- atau 30,36 %
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Dari total anggaran sebesar Rp. 7.169.200,- terealisasi Rp. 0,- atau 0 %
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
Dari total anggaran sebesar Rp. 10.654.800,- terealisasi Rp. 6.147.000,- atau 57,69 %
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dari total anggaran sebesar Rp. 6.758.800,- terealisasi Rp. 4.237.000,- atau 62,68 %
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dari total anggaran sebesar Rp. 74.440.200,- terealisasi Rp. 32.068.380,- atau 43,07 %
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dari total anggaran sebesar Rp. 10.767.300,- terealisasi Rp. 7.182.600,- atau 66,70 %
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dari total anggaran sebesar Rp. 19.072.800,- terealisasi Rp. 7.947.000,- atau 41,66 %
14. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Dari total anggaran sebesar Rp. 8.068.200,- terealisasi Rp. 3.361.750,- atau 41,66 %
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
Dari total anggaran sebesar Rp. 22.089.100,- terealisasi Rp. 9.460.000,- atau 42,82 %
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dari total anggaran sebesar Rp. 16.560.000,- terealisasi Rp. 6.960.000,- atau 42,03 %
17. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
Dari total anggaran sebesar Rp. 18.082.800,- terealisasi Rp. 1.890.000,- atau 10,45 %
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Dari total anggaran sebesar Rp. 31.852.400,- terealisasi Rp.

- 28.554.400,- atau 89,64 %
19. Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
Dari total anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- terealisasi Rp. 0,-
atau 0 %
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dari total anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- terealisasi Rp.
7.500.000,- atau 41,66 %
21. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
Dari total anggaran sebesar Rp. 10.079.300,- terealisasi Rp.
2.760.000,- atau 27,38 %
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dari total anggaran sebesar Rp. 24.500.000,- terealisasi Rp.
5.000.000,- atau 20,40 %
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dari total anggaran sebesar Rp. 18.403.700,- terealisasi Rp.
6.547.100,- atau 35,57 %
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan
perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dari total anggaran sebesar Rp. 22.512.400,- terealisasi Rp.
12.851.000,- atau 57,08 %
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
Dari total anggaran sebesar Rp. 101.740.020,- terealisasi Rp.
17.461.000,- atau 17,16 %
26. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Dari total anggaran sebesar Rp. 17.800.000,- terealisasi Rp.
5.275.000,- atau 29,63 %
27. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Dari total anggaran sebesar Rp. 175.000.150,- terealisasi Rp.
66.705.500,- atau 38,12 %
28. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Dari total anggaran sebesar Rp. 15.000.200,- terealisasi Rp.
8.420.200,- atau 56,13 %

29. Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
Dari total anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi Rp. 0,-
atau 0 %
30. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Dari total anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- terealisasi Rp. 22.500.000,- atau 41,66 %
31. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Dari total anggaran sebesar Rp. 68.895.400,- terealisasi Rp. 1.500.000,- atau 2,17 %
32. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dari total anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 7.080.000,- atau 42,2 %
33. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanandan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dari total anggaran sebesar Rp. 15.001.200,- terealisasi Rp. 7.095.000,- atau 47.29 %
34. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Dari total anggaran sebesar Rp. 125.620.400,- terealisasi Rp. 48.961.525,- atau 38,97 %
35. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Dari total anggaran sebesar Rp. 17.800.100,- terealisasi Rp. 3.010.000,- atau 16,91 %
36. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Dari total anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp. 19.400.000,- atau 97 %
37. Fasilitasi Pelaksanaann Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Dari total anggaran sebesar Rp. 10.000.200,- terealisasi Rp. 4.919.200,- atau 49,19 %

38. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 Dari total anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp.
 14.860.000,- atau 99,07 %

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Pada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.085.331.091	862.204.825	27,94
A	Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10.196.400	4.196.400	41,15
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	0	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	0	0
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	0	0
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.363.292.891	715.542.198	30,27
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.356.123.691	715.542.198	30,36
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.169.200	0	0
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.654.800	6.147.000	57,69
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.654.800	6.147.000	57,69
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.839.200	73.106.730	41,57
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.758.800	4.237.000	62,68
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.440.200	32.068.380	43,07
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.767.300	7.182.600	66,70
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.072.800	7.947.000	41,66
14	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.068.200	3.361.750	41,66
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.089.100	9.460.000	42,82

16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.560.000	6.960.000	42,03
17	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	18.082.800	1.890.000	10,45
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	431.852.400	28.554.400	6,61
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.852.400	28.554.400	89,64
19	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	400.000.000	0	0
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.579.300	15.260.000	29,02
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	7.500.000	41,66
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.079.300	2.760.000	27,38
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.500.000	5.000.000	20,40
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.916,100	19.398.100	47,40
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.403.700	6.547.100	35,57
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.512.400	12.851.000	57,08
2	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	294.540.170	89.441.500	30,37
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	101.740.020	17.461.000	17,16
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	101.740.020	17.461.000	17,16
B	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	192.800.150	71.980.500	37,33
26	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.800.000	5.275.000	29,63
27	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	175.000.150	66.705.500	38,12
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.000.200	8.420.200	18,71
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.200	8.420.200	56,13
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.200	8.420.200	56,13
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	0	0
29	Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	0	0

4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	137.895.400	31.080.000	22,54
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.000.000	22.500.000	41,66
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	54.000.000	22.500.000	41,66
B	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	83.895.400	8.580.000	10,22
31	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.000.000	7.080.000	42,2
32	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	68.895.400	1.500.000	2,17
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	140.621.600	56.056.525	39,86
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	140.621.600	56.056.525	39,86
33	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.001.200	7.095.000	41,29
34	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	125.620.400	48.961.525	38,97
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.800.300	42.189.200	67,18
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.800.300	42.189.200	67,18
35	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.800.100	3.010.000	16,91
36	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	19.400.000	97
37	Fasilitasi Pelaksanaann Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.000.200	4.919.200	49,19
38	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	14.860.000	99,07

Sumber : Pengolahan data Kecamatan Malangbong dan LRA sampai dengan Semester II Tahun 2023.

2) Realisasi program, kegiatan, Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Malangbong dalam pelaksanaan Renja tahun 2023

sampai Triwulan II, ada 5 (lima) yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- a. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Kegiatan Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2023 Rp. 4.196.400,- terealisasi Rp. 4.196.400,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2023 (TW II)

No	Kegiatan	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
A	Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.196.400	4.196.400	100

Sumber : Pengolahan data Kecamatan Malangbong dan LRA sampai dengan Semester II Tahun 2023.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada tahun anggaran 2023 TW II, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong.
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
 - a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Adanya mutasi pegawai sehingga anggaran untuk pemberian gaji/belanja pegawai tidak terserap seluruhnya.

- 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
 - 3) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
 - 4) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
 - 5) Penyerapan anggaran baru sampai dengan triwulan II, sehingga banyak program/kegiatan yang belum mencapai target.
 - b. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong adalah sebagai berikut :
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong tahun 2023 TW II berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Malangbong pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Malangbong.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RPJMD dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 28.92 % untuk target kinerja dan 28,92 % untuk target anggaran. Jumlah realisasi Anggaran di bagi jumlah Pagu Anggaran di kali seratus persen :

$$\frac{1.089.392.250}{3.766.188.761} \times 100\% = 28,92 \%$$

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Malangbong selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
Periode Pelaksanaan Tahun 2023 TW II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)				K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17				

1	7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	100 %	10.29 6.847 .624	100 %	4.461.9 87.420, 00	100 %	3.085.3 31.096, 00	14 %	428. 640. 616	14 ,0 5 %	433. 564. 209										2 8 %	862. 204. 825	27 ,9 5	862.2 04.82 5							
2				Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	8.576 .964	100 %	7.948. 500,0 0	100 %	10.19 6.405, 00	41 %	4.19 6.40 0	0 %	-									0 %	4.19 6.40 0	41 ,1 6	4.196 .400								
3				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	8.576 .964	5 dokumen	7.948. 500,0 0	5 dokumen	4.196. 400,0 0	10 0%	4.19 6.40 0	0 %	-								1 0 0 %	4.196 .400	10 0, 00	4.196 .400									Kasu bag Umum dan Evlap
4				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1.000. 000,0 0	0%	-	0 %	-								0 %	-	-										

					Perubahan DPA-SKPD																					
8					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan					1 laporan	1.000.001,00	0%	-	0%	-			0%	-	-					
9					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-		1 laporan	1.000.001,00	0%	-	0%	-			0%	-	-	-				Kasubag Umum dan Evalap
10					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
					Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.696.664.687	100	2.227.937.513,00	100	2.363.292.891,00	16%	377.651.966	14,34%	337.890.229	30%	715.542.195	30,28	715.542.195	42.195					

No		Uraian	Daerah																								
1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	2.688.778.512	1 tahun	2.223.280.013,00	1 tahun	2.356.123.691,00	16%	377.651.966	14,34%	337.890.229		30%	715.542.195	30,37%	715.542.195						Kasubag Umum dan Evlap	Penambahan sebesar Rp. 37.801.915		
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	7.886.175	1 laporan	4.657.500,00	1 laporan	7.169.200,00	0%	-	0%	-		0%	-	-	-							Kasubag Umum dan Evlap		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13.834.559	100%	17.652.800,00	100%	10.654.800,00	0%	-	57,69%	6.147.000		58%	6.147.000	57,69%	6.147.000									
	4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 stel	13.834.559	32 stel	17.652.800,00	32 stel	10.654.800,00	0%	-	57,69%	6.147.000		58%	6.147.000	57,69%	6.147.000								Kasubag Umum dan Evlap	

15							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																											
16							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 item	7.434.034	9 item	5.602.300,00	9 item	6.758.800,00	0%	-	62,69%	46.361.580	41%	71.216.730	40,50%	71.216.730													Kasubag Umum dan Evlap
17							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Alat tulis kantor (ATK) -Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	2 item	129.548.823	2 item	52.358.500,00	2 item	74.440.200,00	19,79%	14.733.350	23,29%	17.335.030	43%	32.068.380	43,08%	32.068.380													Kasubag Umum dan Evlap
18							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga	13 jenis	11.848.030	13 jenis	7.834.507,00	13 jenis	10.767.300,00	0%	-	66,71%	7.182.600	67%	7.182.600	66,71%	7.182.600													Kasubag Umum dan Evlap
19							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis penyediaan barang cetakan dan	5 item	33.026.902	5 item	9.502.500,00	5 item	19.072.800,00	17%	3.178.800	25,00%	4.768.200	42%	7.947.000	41,67%	7.947.000													Kasubag Umum dan Evlap

					ndaan	penggan																					
	20				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	99 exemplar	8.933.938	99 exemplar	6.780.000,00	99 exemplar	8.068.200,00	17 %	1.344.000	25,01 %	2.017.750	42 %	3.361.750	41,67 %	3.361.750						Kasubag Umum dan Evlap	
	21				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas kunjungan tamu	780 orang	41.527.200	780 orang	13.500.000,00	780 orang	22.089.100,00	17 %	3.784.000	25,70 %	5.676.000	43 %	9.460.000	42,83 %	9.460.000						Kasubag Umum dan Evlap	
	22				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	252 kali	44.109.340	252 kali	43.790.000,00	252 kali	16.560.000,00	17 %	2.760.000	25,36 %	4.200.000	42 %	6.960.000	42,03 %	6.960.000						Kasubag Umum dan Evlap	
	23				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen				1 dokumen	18.082.800,00	5 %	945.000	5,23 %	945.000	10 %	1.890.000	10,45 %	1.890.000							
	25				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah pelaporan pengadaan barang milik	1 laporan	7.059.419.268	1 laporan	1.937.700.400,00	1 laporan	431.852.400,00	0,00	554.400	6,48 %	28.000.001	7 %	28.554.401	6,61 %	28.554.401							

47				Pembinaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Laporan	30.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0,00	-										
60				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelesaian Tugas Perintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Trantibum	100%	160.669.039	100%	72.963.600,00	100%	137.895.400,00	11%	14.800,00	11,79%	16.260,00	23%	31.080,00	22,54%	31.080,00									
61				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	71.119.323	1 laporan	61.726.000,00	1 laporan	54.000.000,00	17%	9.000,00	25,00%	13.500,00	42%	22.500,00	41,67%	22.500,00									

62				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi	12 kali/bulan	71.119.323	12 kali	61.726.000,00	12 kali	54.000.000,00	17%	9.000.000	25,00%	13.500.000			42%	22.500.000,00	41,67	22.500.000,00			Kasi Trantib
63				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	1 laporan	89.549.716,30	1 laporan	11.237.600,00	1 laporan	83.895.400,00	7%	5.820.000	3,29%	2.760.000			49%	8.580.000,00	10,23	8.580.000,00			
64				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka pnegakan perda/perkada	2 kali/tahun	22.999.317,00	2 kali/tahun	11.237.600,00	2 kali/tahun	15.000.000,00	39%	5.820.000	8,40%	1.260.000			47%	7.080.000,00	47,20	7.080.000,00			

67	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	291.884.531	12 kali	221.104.500	12 kali	140.621.600	17%	24.192.925	22,66%	31.863.600			40%	56.056.525,00	39,86%	56.056.525,00
68	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2 kegiatan	25.593.623,55	2 kegiatan	21.104.500,00	2 kegiatan	15.001.200,00	0,47%	7.095.000	0%	-			47%	7.095.000,00	47,30%	7.095.000,00

71					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 laporan	102.736.805	1 laporan	32.599.900,00	1 laporan	62.800.300,00	27 %	17.242.000	39,72 %	24.947.200							67 %	42.189.200	67,18 %	42.189.200	
72					Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 kegiatan	54.311.334	3 kegiatan	12.344.000,00		17.800.100,00	8%	1.470.000	8,65 %	1.540.000							17 %	3.010.000	16,91 %	3.010.000	
73					Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumentasi Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen				1 dokumen	20.000.000,00	0%	-	97,00 %	19.400.000							97 %	19.400.000	97 %	19.400.000	
74					Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemas	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 kegiatan	34.446.946	1 kegiatan	10.159.400,00	1 kegiatan	10.000.200,00	0,19 %	1.892.000	30,27 %	3.027.200								49 %	4.919.200	49,19 %	4.919.200

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

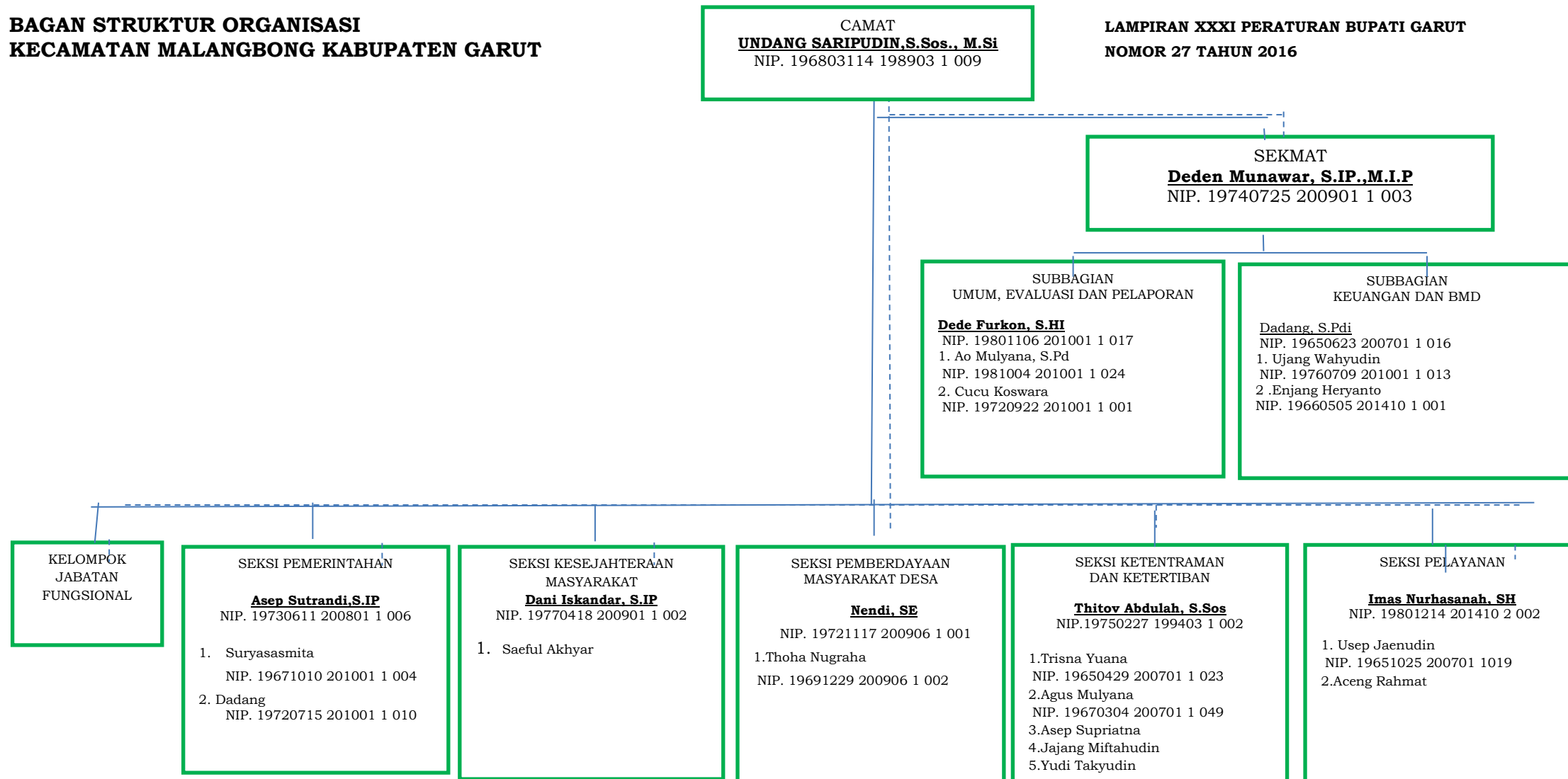
Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Malangbong sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malangbong. Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2016**



Sumber: Perbup Nomor 27 Tahun 2016

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)
1	Nilai SKM			80,06	81,30	82	82,20	80,06	86,56	82	82,20	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			n/a	7,8	7,87	7,88	n/a	7,8	7,87	7,88	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			n/a	75 %	80 %	85 %	n/a	75 %	80 %	85 %	
4	Nilai SAKIP			CC	CC	B	B	CC	CC	B	B	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Malangbong, 2023

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Malangbong bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanggulangan pandemi COVID-19.
5. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
6. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada kurang *Update*
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
4. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
5. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang COVID-19.
6. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
7. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malangbong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Malangbong berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Malangbong

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran Murni Sebesar Rp. 3.766.188.761 dan anggaran perubahan tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Malangbong sebesar Rp.4.435.135.838,-. Terjadi kenaikan usulan sebesar Rp. 668.947.077,-. Dengan rincian usulan perubahan Anggaran Yaitu

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Rp. 2.287.176.614 menjadi Rp. 2.356.123.691, naik sebesar Rp. 68.947.077,-
2. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dari Rp. 10.770.925,-menjadi Rp. 110.770.925 (Usulan Baru Pembelian Gordyn),naik sebesar Rp. 100.000.000,-
3. Penataan halaman kantor dan lahan parkir (Usulan Baru) Rp. 500.000.000,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Malangbong diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi pengendalian terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Malangbong

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Malangbong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Urusan : Kewilayahan																	
	7.01.25.	Bidang Urusan : Kecamatan Malangbong					6,00	6,00					9.759.396.8 29,00	3.766.188. 811					10.218.351. 508,70
1	7.01.7.01.25.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administra si Perkantora n			Kec. Malang bong	100%	100%					8.711.113.9 90,00	3.085.331. 141,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	9.170.068.6 70,20
1	7.01.7.01.25.0 1.01.	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		Kec. Malang bong			100%	100%			13.948.500, 00	10.196.400 ,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	13.797.020, 00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	7.01.7.01.25.0 1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaa n	Kec. Malang bong					1 dokum en	1 dokum en	7.948.500,0 0	4.196.400, 00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 dokum en	1 dokum en	7.797.020
	7.01.7.01.25.0 1.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Malang bong					1 dokum en	1 dokum en	1.000.000,0 0	1.000.000, 00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 dokum en	1 dokum en	1.000.000
	7.01.7.01.25.0 1.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Malang bong					1 dokum en	1 dokum en	1.000.000,0 0	1.000.000, 00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 dokum en	1 dokum en	1.000.000

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target		
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7.01.7.01.25.0 1.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Malang bong						1 dokum en	1 dokum en	1.000.000,0 0	1.000.000, 00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 dokum en	1 dokum en	1.000.000
	7.01.7.01.25.0 1.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Malang bong						1 dokum en	1 dokum en	1.000.000,0 0	1.000.000, 00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 dokum en	1 dokum en	1.000.000

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target		
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7.01.7.01.25.0 1.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Malang bong						1 Lapora n	1 Lapora n	1.000.000,0 0	1.000.000, 00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 Lapora n	1 Lapora n	1.000.000
	7.01.7.01.25.0 1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malang bong						1 Lapora n	1 Lapora n	1.000.000,0 0	1.000.000, 00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 Lapora n	1 Lapora n	1.000.000

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7.01.7.01.25.0 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Malang bong			100%	100%			2.451.513.3 52,00	2.363.292. 941,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	2.451.513.3 52,20
1	7.01.7.01.25.0 1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Malang bong					1 tahun	1 tahun	2.444.344.1 02,00	2.356.123. 691,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		1 tahun	1 tahun	2.444.344.1 02,2
2	7.01.7.01.25.0 1.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Malang bong					1 laporan	1 laporan	7.169.250,0 0	7.169.250, 00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		1 laporan	1 laporan	7.169.250,0 0
3	7.01.7.01.25.0 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Malang bong			100%	100%			12.576.872, 00	10.654.800 ,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	12.576.872, 00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	7.01.7.01.25.0 1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapan nya			Jumlah Stel Pengadaan Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengka n nya	Kec. Malang bong					32 Stel	32 Stel	12.576.872, 00	10.654.800 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		32 Stel	32 Stel	12.576.872, 00
4	7.01.7.01.25.0 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malang bong			100%	100%				277.352.86 2,00	175.839.20 0,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	277.352.86 2,00
1	7.01.7.01.25.0 1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Kec. Malang bong					9 item	9 item	6.758.950,0 0	6.758.800, 00	Dana Trans fer Umu m- DAU		9 item	9 item	6.758.950,0 0

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7.01.7.01.25.0 1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Alat tulis kantor () peralatan dan perlengkap an kantor yang memadai	Kec. Malang bong					2 item	2 item	117.771.65 7,00	74.440.200 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		2 item	2 item	117.771.65 7,00
3	7.01.7.01.25.0 1.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga	Kec. Malang bong					13 jenis	13 jenis	10.770.925, 00	10.767.300 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		13 jenis	13 jenis	10.770.925, 00
4	7.01.7.01.25.0 1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Malang bong					5 item	5 item	29.690.760, 00	19.072.800 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		5 item	5 item	29.690.760, 00
5	7.01.7.01.25.0 1.06.05.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan			Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	Kec. Malang bong					99 exempl ar	99 exempl ar	8.129.220,0 0	8.068.200, 00	Dana Trans fer Umu m- DAU		99 exempl ar	99 exempl ar	8.129.220,0 0

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	7.01.7.01.25.0 1.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Pelaksanaa n Fasilitasi kunjungan tamu	Kec. Malang bong					780 orang	780 orang	37.752.000, 00	22.089.100 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		780 orang	780 orang	37.752.000, 00
7	7.01.7.01.25.0 1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi n konsultasi SKPD	Kec. Malang bong					252 kali	252 kali	40.095.000, 00	16.560.000 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		252 kali	252 kali	40.095.000, 00
8	7.01.7.01.25.0 1.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kec. Malang bong					1 Dokum en	1 Dokum en	26.384.350, 00	18.082.800 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 Dokum en	1 Dokum en	26.384.350, 00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	7.01.7.01.25.0 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah		Kec. Malang bong			1 lapor an	1 lapor an			5.756.025.7 97,00	431.852.40 0,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		1 lapora n	1 lapora n	6.215.131.9 57,00
1	7.01.7.01.25.0 1.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Malang bong					1 unit	1 unit	48.017.200, 00	0,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 unit	1 unit	48.017.200, 00
	7.01.7.01.25.0 1.07.02.	pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	Kec. Malang bong					3 Unit	3 Unit		0,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		3 Unit	3 Unit	309.106.16 0,00
	7.01.7.01.25.0 1.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec. Malang bong					3 Unit	3 Unit	37.500.000, 00	31.852.400 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		3 Unit	3 Unit	37.500.000, 00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7.01.7.01.25.0 1.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Luas Tanah Untuk Bangunan Polsek dan Koramil, Jumlah unit Gedung Kantor Kecamatan, Luas tanah untuk kantor	Kec. Malang bong					4200 m2 1 unit 420 m2	4200 m2 1 unit 420 m2	4.770.508.5 97,00		Dana Trans fer Umu m- DAU		4200 m2 1 unit 420 m2	4200 m2 1 unit 420 m2	4.770.508.5 97,00
	7.01.7.01.25.0 1.07.0.	Pengadaan Tanah Untuk Lahan Parkir			Luas tanah Untuk Lahan parkir Pasilitasi Kenyamana n Pelayanan Masyarakat	Kec. Malang bong					412 M ²	412 M ²	500.000.00 0,00	400.000.00 0,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		412 M ²	412 M ²	550.000.00 0,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target		
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7.01.7.01.25.0 1.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec. Malang bong					1 Lapora n	1 Lapora n	400.000.00 0,00		Dana Trans fer Umu m- DAU		1 Lapora n	1 Lapora n	500.000.00 0,00	
6	7.01.7.01.25.0 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase PemenuhanPe nyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Malang bong			100%	100%			56.591.942, 00	52.579.300 ,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	56.591.942, 00	
1	7.01.7.01.25.0 1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec. Malang bong						36 kali	36 kali	21.780.000, 00	18.000.000 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		36 kali	36 kali	21.780.000, 00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7.01.7.01.25.0 1.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah item peralatan dan perlengka pan kantor yang terpelihara	Kec. Malang bong					3 item	3 item	10.079.300, 00	10.079.300 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		3 item	3 item	10.079.300, 00
3	7.01.7.01.25.0 1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Malang bong					28 orang/b ulan	28 orang/b ulan	24.732.642, 00	24.500.000 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		28 orang/b ulan	28 orang/b ulan	24.732.642, 00
7	7.01.7.01.25.0 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malang bong				100%	100%			143.104.66 5,00	40.916.100 ,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	143.104.66 5,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	7.01.7.01.25.0 1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Malangbong					14 unit	14 unit	24.193.345,00	18.403.700,00	Dana Transfer Umum-DAU		14 unit	14 unit	24.193.345,00
2	7.01.7.01.25.0 1.09.09.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan			jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Malangbong					1 unit	1 unit	20.571.320,00	22.512.400,00	Dana Transfer Umum-DAU		1 unit	1 unit	20.571.320,00
3	7.01.7.01.25.0 1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor yang memadai	Kec. Malangbong					3 unit	3 unit	98.340.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-DAU		3 unit	3 unit	98.340.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II	7.01.7.01.25.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	% Fasilitas Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintah an dan Pelayanan Pub;ik yang dilaksanak an oleh Kecamatan			Kec. Malang bong	100%	100%					348.066.42 0,00	294.540.17 0,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	348.066.42 0,00
1	7.01.7.01.25.0 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggara an kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Kec. Malang bong			1 lapor an	1 lapor an			193.552.37 0,00	101.740.02 0,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		1 lapora n	1 lapora n	193.552.37 0,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target		
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	7.01.7.01.25.0 2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah pelaksanaan monitoring BPNT, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi Kegiatan olahraga, penanggulangan covid dan monitoring kegiatan ODF	Kec. Malang bong						5 kegiatan	5 kegiatan	193.552.37 0,00	101.740.02 0,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		5 kegiatan	5 kegiatan	193.552.37 0,00
2	7.01.7.01.25.0 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah laporan Penyelenggara an PATEN		Kec. Malang bong			lapo ran	Lapo ran				154.514.05 0,00	192.800.15 0,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		Lapora n	lapora n	154.514.05 0,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	7.01.7.01.25.0 2.02	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilakukan di Kecamatan	Kec. Malang bong					12 bulan	12 bulan	24.514.050, 00	17.800.000 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		12 bulan	12 bulan	24.514.050, 00
2	7.01.7.01.25.0 2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Pengelolaan Sampah di Kecamatan	Kec. Malang bong					12 bulan	12 bulan	130.000.00 0,00	175.000.15 0,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		12 bulan	12 bulan	130.000.00 0,00
III	7.01.7.01.25.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelur ahan yang dapat diberdayak an			Kec. Malang bong	100%	100%					84.915.100, 00	45.000.200 ,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	84.915.100, 00
1	7.01.7.01.25.0 3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		Kec. Malang bong			1 lapor an	1 lapor an			84.915.100, 00	45.000.200 ,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		1 lapora n	1 lapora n	84.915.100, 00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024				
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)		
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target			
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	7.01.7.01.25.0 3.01.01.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah pelaksanaan monitoring/e valuasi pembangun an dan pemberdaya an masyarakat	Kec. Malang bong							24 desa	24 desa	34.915.100, 00	15.000.200 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		24 desa	24 desa	34.915.100, 00
	7.01.7.01.25.0 3.01.03.	Pembinaan Penangann Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			Jumlah Dokumen Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec. Malang bong							1 dokum en	1 dokum en	50.000.000, 00	30.000.000 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 dokum en	1 dokum en	50.000.000, 00
IV	7.01.7.01.25.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyeleng garaan Tugas Pemerintah an Umum Tingkat Kecamatan			Kec. Malang bong	100%	100%					104.262.40 0,00	137.895.40 0,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	104.262.40 0,00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	7.01.7.01.25.0 4.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum		Kec. Malang bong			1 lapor an	1 lapor an			83.353.930, 00	122.895.40 0,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		1 lapora n	1 lapora n	83.353.930, 00
1	7.01.7.01.25.0 4.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/POLRI		Kec. Malang bong					12 kali/bul an	12 kali/bul an	64.653.930, 00	54.000.000 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		12 kali/bul an	12 kali/bul an	64.653.930, 00
2	7.01.7.01.25.0 4.01.02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama		Kec. Malang bong					1 kegiata n	1 kegiata n	18.700.000, 00	68.895.400 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 kegiata n	1 kegiata n	18.700.000, 00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7.01.7.01.25.0 4.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan		Kec. Malang bong			1 lapor an	1 lapor an			20.908.470, 00	15.000.000 ,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		1 lapora n	1 lapora n	20.908.470, 00
1	7.01.7.01.25.0 4.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka penegakan perda/perka da	Kec. Malang bong					2 kali/tah un	2 kali/tah un	20.908.470, 00	15.000.000 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		2 kali/tah un	2 kali/tah un	20.908.470, 00
V	7.01.7.01.25.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyeleng garaan Urusan Pemerintah an Umum yang dilimpahka n Kepada Camat			Kec. Malang bong	100%	100%					320.349.57 4,00	140.621.60 0,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	320.349.57 3,50

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024				
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)		
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target			
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	7.01.7.01.25.0 5.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan		Kec. Malang bong			1 lapor an	1 lapor an			320.349.57 4,00	140.621.60 0,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		1 lapora n	1 lapora n	320.349.57 4,00		
1	7.01.7.01.25.0 5.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pelaksanaa n Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kec. Malang bong							2 kegiata n	2 kegiata n	23.266.931, 00	15.001.200 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		2 kegiata n	2 kegiata n	23.266.931, 00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7.01.7.01.25.0 5.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah rapat sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kec. Malang bong					1 tahun	1 tahun	55.000.000, 00	-	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 tahun	1 tahun	55.000.000, 00
3	7.01.7.01.25.0 5.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Pelaksanaa n Rapat Koordinasi Forkopimca m, koordinasi terkait covid	Kec. Malang bong					12 kali	12 kali	242.082.64 3,00	125.620.40 0,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		12 kali	12 kali	242.082.64 3,00
VI	7.01.7.01.25.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik			Kec. Malang bong	100%	100%					190.689.34 5,00	62.800.300 ,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		100%	100%	190.689.34 5,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	7.01.7.01.25.0 6.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Malang bong			1 lapor an	1 lapor an			190.689.34 5,00	62.800.300 ,00	Dana Tran sfer Umu m- DAU		1 lapora n	1 lapora n	190.689.34 5,00
1	7.01.7.01.25.0 6.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi tata pemerintah n desa		Kec. Malang bong					3 kegiata n	3 kegiata n	49.373.940, 00	17.800.100 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		3 kegiata n	3 kegiata n	49.373.940, 00
	7.01.7.01.25.0 6.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumentas i Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa n Pemilihan Kepala Desa		Kec. Malang bong					1 Lapora n	1 Lapora n	60.000.000, 00	20.000.000 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 Lapora n	1 Lapora n	60.000.000, 00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023										Cata tan Penti ng	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
							Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7.01.7.01.25.0 6.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarak atan tingkat kecamatan	Kec. Malang bong					1 laporan	1 laporan	31.315.405, 00	10.000.200 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 laporan	1 laporan	31.315.405, 00
3	7.01.7.01.25.0 6.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			Jumlah dokumen RPTK	Kec. Malang bong					1 dokum en	1 dokum en	50.000.000, 00	15.000.000 ,00	Dana Trans fer Umu m- DAU		1 dokum en	1 dokum en	50.000.000, 00
TOTAL							6,00	6,00					9.759.396.8 29,00	3.766.188. 811,00					10.218.351. 508,70

Sumber : SIPD Perubahan Renja Kecamatan Malangbong Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Malangbong Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Malangbong Tahun 2019-2024
 2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut
 3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut
 4. Meningkatkan keterssediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
 5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efesien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku
 6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah
- Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Malangbong yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera" Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir.
 4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
 5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah;

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

PPD 1: Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;

PPD 3: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

PPD 4: Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;

PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;

PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;

PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan, dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah **Percepatan**

Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, SKPD Kabupaten Garut

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Malangbong mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 3.1

Tabel 3.1**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Malangbong
Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Meningkatnya kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82,20
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7,88
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	85 %
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	B

Sumber : Renstra Kecamatan Malangbong tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

7. Jumlah Kepala Seksi sebanyak 5 Kepala Seksi dan 2 Kepala Subbag yaitu:

- 1). Kepala Seksi Pemerintahan
- 2). Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3). Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- 4). Kepala Seksi Pelayanan
- 5). Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6). Kepala Subbag Umum dan BMD
- 7). Kepala Subbag Keuanagan dan BMD

8. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum;
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

9. Jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.
10. Jumlah sub kegiatan 39 Sub Kegiatan
11. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9.759.396.829,00, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp.3.771.621.384,00 mengalami penyesuaian sebesar Rp.68.947.077,00 (Penambahan Gaji) dan Rp. 74.379.600 (Pengurangan Anggaran Forkopimcam) pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp.3.766.188.811,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp.500.000.000,00 (Penataan Halaman Kantor dan lahan Parkir) menjadi sebesar Rp. 4.266.188.811,00 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada table berikut:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Malangbong
Kabupaten Garut
Tahun 2023

NO	Urusan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kewilayahan											
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	8.711.113.990,00	3.016.384.064,00	3.085.331.141,00	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	13.948.500,00	10.196.400,00	10.196.400,00	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	7.948.500,00	4.196.400,00	4.196.400,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

NO	Urusan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

NO	Urusan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.451.513.352,00	2.294.345.864,00	2.363.292.941,00	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	1 tahun	2.444.344.102,00	2.287.176.614,00	2.356.123.691,00	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	7.169.250,00	7.169.250,00	7.169.250,00	
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1 laporan	1 laporan	12.576.872,00	10.654.800,00	10.654.800,00	
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapan nya	32 Stel	32 Stel	32 Stel	12.576.872,00	10.654.800,00	10.654.800,00	
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	277.352.862,00	175.839.200,00	175.839.200,00	

NO	Urusan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 item	9 item	9 item	6.758.950,00	6.758.800,00	6.758.800,00	
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat tulis kantor (ATK) peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Jumlah Alat tulis kantor (ATK) peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	2 item	2 item	2 item	117.771.657,00	74.440.200,00	74.440.200,00	
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga	13 jenis	13 jenis	13 jenis	10.770.925,00	10.767.300,00	10.767.300,00	
4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 item	5 item	5 item	29.690.760,00	19.072.800,00	19.072.800,00	
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	99 exemplar	99 exemplar	99 exemplar	8.129.220,00	8.068.200,00	8.068.200,00	

NO	Urusan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi kunjungan tamu	780 orang	780 orang	780 orang	37.752.000,00	22.089.100,00	22.089.100,00	
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasidan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasidan konsultasi SKPD	252 kali	252 kali	252 kali	40.095.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00	
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.384.350,00	18.082.800,00	18.082.800,00	
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	5.756.025.797,00	431.852.400,00	931.852.400,00	
			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	-	-	Selisih pagu Anggaran Pembangunan Gedung dengan Nilai kontrak

NO	Urusan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	48.017.200,00	-	-	
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	1 unit	1 unit	1 unit	37.500.000,00	31.852.400,00	31.852.400,00	
2		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Tanah Untuk Bangunan Polsek dan Koramil, Jumlah unit Gedung Kantor Kecamatan, Luas tanah untuk kantor	Jumlah unit Gedung Kantor Kecamatan yang memadai	4200 m2 1 unit 420 m2	1 Unit	1 Unit	4.770.508.597,00	-	-	
			Pengadaan Tanah lahan parkir		Tersedianya Luas tanah Untuk lahan Parkir yang dibutuhkan		412 M²	412 M²	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Lahan parkir untuk Pelayanan bagi Masyarakat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya			1 Laporan	400.000.000,00	-	500.000.000,00	

NO	Urusan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	56.591.942,00	52.579.300,00	52.579.300,00	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	36 kali	36 kali	36 kali	21.780.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	3 item	4 Jenis	4 Jenis	10.079.300,00	10.079.300,00	10.079.300,00	
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28 orang/bulan	28 orang/bulan	28 orang/bulan	24.732.642,00	24.500.000,00	24.500.000,00	
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	143.104.665,00	40.916.100,00	40.916.100,00	

NO	Urusan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit pembayaran kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit pembayaran kendaraan Dinas Jabatan	14 unit	14 unit	14 unit	24.193.345,00	18.403.700,00	18.403.700,00	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	1 unit	20.571.320,00	22.512.400,00	22.512.400,00	
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang memadai	Jumlah Gedung Kantor yang memadai	3 unit	1 gedung	1 gedung	98.340.000,00	0,00	0,00	
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	% Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	% Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	100%	348.066.420,00	294.540.170,00	294.540.170,00	
1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	193.552.370,00	101.740.020,00	101.740.020,00	

NO	Ura- n	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan monitoring BPNT, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi Kegiatan olahraga, penanggulangan covid dan monitoring kegiatan ODF	Jumlah pelaksanaan monitoring BPNT, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi Kegiatan olahraga, penanggulangan covid dan monitoring kegiatan ODF	5 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	193.552.370,00	101.740.020,00	101.740.020,00	
2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	Laporan	1 laporan	1 laporan	154.514.050,00	192.800.150,00	192.800.150,00	
1		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilakukan di Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilakukan di Kecamatan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	24.514.050,00	17.800.000,00	17.800.000,00	
2		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengelolaan Sampah di Kecamatan	Jumlah Pengelolaan Sampah di Kecamatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	130.000.000,00	175.000.150,00	175.000.150,00	
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	100%	100%	84.915.100,00	45.000.200,00	45.000.200,00	

NO	Urusan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	84.915.100,00	45.000.200,00	45.000.200,00	
1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	24 desa	24 Desa	24 Desa	34.915.100,00	15.000.200,00	15.000.200,00	
		Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
IV		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	104.262.400,00	137.895.400,00	137.895.400,00	
1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	1 laporan	1 laporan	1 laporan	83.353.930,00	122.895.400,00	122.895.400,00	

NO	Uraian	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/POLRI	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/POLRI	12 kali/bulan	12 kali/bulan	12 kali/bulan	64.653.930,00	54.000.000,00	54.000.000,00	
2		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 kali	7 cabang	7 cabang	18.700.000,00	68.895.400,00	68.895.400,00	
2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	20.908.470,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka penegakan perda/perkada	Jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka penegakan perda/perkada	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	20.908.470,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
v		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%	100%	320.349.574,00	215.001.200,00	140.621.600,00	

NO	Uraian	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	320.349.574,00	215.001.200,00	140.621.600,00	
1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	23.266.931,00	15.001.200,00	15.001.200,00	
2		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah rapat sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah rapat sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 tahun	1 tahun	o	55.000.000,00	-	-	Tidak terlaksana
3		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam, koordinasi terkait covid	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam, koordinasi terkait covid	12 kali	12 kali	12 kali	242.082.643,00	200.000.000,00	125.620.400,00	
VI		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	100%	100%	190.689.345,00	62.800.300,00	62.800.300,00	

NO	Urusan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PEMERINTAHAN DESA										
1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	190.689.345,00	62.800.300,00	62.800.300,00	
1		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	49.373.940,00	17.800.100,00	17.800.100,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	31.315.405,00	10.000.200,00	10.000.200,00	
3		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen RPTK	Jumlah dokumen RPTK	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
TOTAL									9.759.396.829,00	3.771.621.334,00	4.266.188.811,00	

Sumber: SIPD perubahan RKPD P Penetapan Tahun 2023

Tabel 3.3
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Malangbong
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Malangbong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Pen ting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et			
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Ses udah			Sebelu m	Sesudah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0 1				KECAMATAN													15,656,3 40,27 0			
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													14,471,2 29,14 7			
7	0 1	0 1	2, 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													15.176.9 64			
7	0 1	0 1	2, 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse n	100 Perse n	2 Doku men	2 Doku men	100 Perse n	100 Perse n	4.196.40 0	4.196.40 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Perse n	8.576.96 4

7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.100.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.100.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.100.000

7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.100.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.100.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat	100 Persen	1.100.000

																					at Daerah									
7	0	0	2,		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														2.294.34	2.009.92						2.996.66				
	1	1	02																				5.814	5.977						4.687
7	0	0	2,	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malang bong, Malang bong	100 Perse n	100 Perse n	22 orang /b ulan	22 orang /b ulan	100 Perse n	100 Perse n	2.287.176.614	2.002.756.777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Perse n	2.988.778.512								
7	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malang bong, Malang bong	100 Perse n	100 Perse n	1 Laporan	1 Laporan	100 Perse n	100 Perse n	7.169.200	7.169.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Perse n	7.886.175								
7	0	0	2,		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														10.654.800	10.654.800						13.834.59				
	1	1	05																											

7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pelaksanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse	100 Perse	32 Paket	32 Paket	100 Perse	100 Perse	10.654.800	10.654.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Perse	13.834.559
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												175.839.200	175.839.200		305.124.149	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pelaksanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse 1 Dokumen	100 Perse 1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	6.758.800	6.758.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	100 Perse 1 Dokumen	7.434.845
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse 1 Dokumen	100 Perse 1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	74.440.200	74.440.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penata	100 Perse 1 Dokumen	129.584.823

						Dinamis Pada SKPD												usaha an Arsip Dinamis Pada SKPD			
7	01	01	2,063	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penata usaha an Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penata Usaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malang bong, Malang bong	100 Perse n 1 Doku men	100 Perse n 1 Doku men	1 Paket	1 Paket	1 Doku men	1 Doku men	10.767.300	10.767.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksa naan Adminis trasi Umum Perangk at Daerah Penata usaha an Arsip Dinamis Pada SKPD	100 Perse n 1 Doku men	11.848.018
7	01	01	2,065	0	Penyediaan Barang Cetak an dan Pengganda an	Jumlah Pelaksana an Adminis trasi Umum Perangkat Daerah Penata usaha an Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Pengganda an yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penata Usaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malang bong, Malang bong	100 Perse n 1 Doku men	100 Perse n 1 Doku men	1 Paket	1 Paket	1 Doku men	1 Doku men	19.072.800	19.072.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksa naan Adminis trasi Umum Perangk at Daerah Penata usaha an Arsip Dinamis Pada SKPD	100 Perse n 1 Doku men	32.659.836

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse n 1 Dokumen	100 Perse n 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.068.200	8.068.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	100 Perse n 1 Dokumen	8.942.142
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse n 1 Dokumen	100 Perse n 1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.089.100	22.089.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	100 Perse n 1 Dokumen	41.527.200
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse n 1 Dokumen	100 Perse n 1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.560.000	16.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan	100 Perse n 1 Dokumen	44.104.500

						Pada SKPD													Arsip Dinamis Pada SKPD		
7	01	01	2,060	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse 1 Dokumen	100 Perse 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.082.800	18.082.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	100 Perse 1 Dokumen	29.022.785
7	01	01	2,070		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											431.852.400	431.852.400				5.781.377.720
7	01	01	2,071	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Unit	1 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	1 Laporan	52.818.920

7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab. Garut, Malang bong, Malang bong	1 Laporan	1 Laporan	2 Unit	2 Unit	1 Laporan	1 Laporan	31.852.400	31.852.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	1 Laporan	41.000.000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab. Garut, Malang bong, Malang bong	1 Laporan	1 Laporan	1 Unit	1 Unit	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	1 Laporan	5.247.558.800
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab. Garut, Malang bong, Malang bong	1 Laporan	1 Laporan	1 Unit	1 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	1 Laporan	440.000.000

																				Daerah		
7	0	0	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												52.579.300	52.579.100			62.251.136	
7	0	0	2,08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100	100	1	1	100	100	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	23.958.000	
7	0	0	2,08	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100	100	1	1	100	100	10.079.300	10.079.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	11.087.230	

7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse	100 Perse	1 Laporan	1 Laporan	100 Perse	100 Perse	24.500.000	24.499.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Perse	27.205.906
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											40.916.100	40.916.100		5.296.799.932		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse	100 Perse	14 Unit	14 Unit	100 Perse	100 Perse	18.403.700	18.403.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Perse	26.612.680
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pelaksanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah Pelaksanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse	100 Perse	1 Unit	1 Unit	100 Perse	100 Perse	22.512.400	22.512.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Perse	22.628.452

					atau Lapangan	han Daerah	Perizinann ya	han Daerah											Pemerin tahan Daerah		
7	0	0	2,	0	Pemelihara an/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksana an Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Tanah Polsek dan Koramil	Jumlah Pelaksana an Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malang bong, Malang bong	100 Perse n	100 Perse n	4200 m2	4200 m2	100 Perse n	100 Perse n	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksa naan Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	100 Perse n	5.247.55 8.800
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												294.540.170	294.540.370			414.873.062
7	0	0	2,		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												101.740.020	101.740.220			212.907.607
7	0	0	2,	0	Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksana an koordinasi penyeleng garaan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksana an koordinasi penyeleng garaan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Malang bong, Malang bong	1 Laporan	1 Laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	101.740.020	101.740.220	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaksa naan koordin asi penyele nggaran kegiatan Pemerin tahan di tingkat Kecamatan	1 Laporan	212.907.607

7	0	0	2,		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								192.800.	192.800.				201.965.			
	1	2	02										150	150				455			
7	0	0	2,	0	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse	100 Perse	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Perse	100 Perse	17.800.000	17.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Perse	26.965.455
7	0	0	2,	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Perse	100 Perse	12 Bulan	12 Bulan	100 Perse	100 Perse	175.000.150	175.000.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	100 Perse	175.000.000

						Daerah yang ada di Kecamatan		Daerah yang ada di Kecamatan												oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											45.000.200	45.000.200			93.406.610	
7	0	0	2,			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											15.000.200	15.000.200			38.406.610	
7	0	0	2,0	3	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.200	15.000.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	1 Laporan	38.406.610
7	0	0	2,			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											30.000.000	30.000.000			55.000.000	
7	0	0	2,0	3	05	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya transisi Pandemi Covid-19 menuju Endemi Covid-19	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase terpenuhinya transisi Pandemi Covid-19 menuju Endemi	100 Persen	0

7	0	0	2,01	0	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	68.895.400	68.895.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	20.570.000
7	0	0	2,02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										15.000.000	15.000.000			22.999.317		
7	0	0	2,02	0	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Kegiatan Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Kegiatan Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Kegiatan Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	22.999.317
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										215.001.	140.621.			352.384.		

	1	5											300	600					531		
7	0	0	2,		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										215.001.	140.621.			352.384.		
	1	5	01										300	600					531		
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	24 Orang	24 Orang	1 Laporan	1 Laporan	15.001.200	15.001.200	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	25.593.624

							Republik Indonesia														
7	01	05	201	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	3 Orang	3 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	60.500.000

7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	200.000.100	125.620.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	266.290.907
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											62.800.300	62.800.300			209.758.280	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											62.800.300	62.800.300			209.758.280	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	17.800.100	17.800.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	54.311.334

7	016	02,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	66.000.000
7	016	02,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	10.000.200	10.000.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	34.446.946

7	0	0	2,	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Malang bong, Malang bong	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	15.000.0 00	15.000.0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	55.000.0 00
TOTAL																3.771.62	3.412.82		15,656,3		
																1.384	1.847		40,27		
																			0		

Sumber : SIPD Perubahan RKPD Kecamatan Malangbnong

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah untuk mencapai keselarasan yang berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan pedoman pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang tentunya memperhatikan kemampuan keuangan daerah, target kinerja yang sudah ditetapkan dan untuk mengakomodir pendanaan DAK dan Bankeu Propinsi.

Dengan telah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2023, maka Renja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Perubahan Renja Kecamatan Malangbong Tahun 2022 menitikberatkan pada penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian indikator sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis maupun kesesuaiannya dengan perubahan rencana anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Adapun kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran", penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut Dokumen Perencanaan ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas dan Fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun Program/kegiatan di Kecamatan Malangbong tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut serta peran aktif *stakeholder* dalam mencapai target kinerja serta tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut yang telah dibuat pada tahun 2023 dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diharapkan, mampu mengoptimalkan pelayanan Kecamatan Malangbong pada masyarakat demi terwujudnya *good government Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera*.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN,